

**PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI BANYUMAS KELAS II
(Studi Penerapan Pasal 3 Ayat (1) Perma No. 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan)**

Oleh :

PUTRI BUNDA LESTARI

E1A019292

ABSTRAK

Mediasi merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa yang sifatnya non litigasi dengan cara berunding antara kedua belah pihak dengan menghadirkan mediator sebagai pihak ketiga. Kewajiban pelaksanaan mediasi diranah pengadilan sebagai perwujudan dari Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang dikuatkan di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan dikhususkan lagi ke dalam Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II dari indeks data perkara gugatan tahun 2020 s/d 2022 serta hambatan dalam pelaksanaan mediasi. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis, dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Sumber data yang digunakan data primer dan sekunder. Data yang diperoleh disajikan secara sistematis dengan tabulasi dan teks uraian, dan analisis dilakukan secara analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi di Pengadilan Negeri Banyumas Kelas II sudah sesuai dengan prosedur Perma No. 1 Tahun 2016 dengan hasil indeks perkara gugatan tahun 2020 s/d 2022 belum efektif karena terdapat beberapa hambatan yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan mediasi yakni berasal dari faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata Kunci : Alternatif Penyelesaian Sengketa, Mediasi, Pengadilan

**IMPLEMENTATION OF MEDIATION IN SETTLEMENT CIVIL
DISPUTE IN CLASS II BANYUMAS STATE COURT
(Study of the Application of Article 3 Paragraph (1) Perma No. 1 of 2016
Concerning Mediation Procedures in Court)**

**By :
PUTRI BUNDA LESTARI
E1A019292**

ABSTRACT

Mediation is an alternative process of resolving non-litigation disputes by negotiating between the two parties by presenting a mediator as a third party. The obligation to carry out mediation in the realm of court as a manifestation of Article 130 HIR and Article 154 RBg which is strengthened in Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and specifically stated in Perma No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. This study aims to determine the implementation of mediation at the Class II Banyumas District Court from the lawsuit case data index from 2020 to 2022 and the obstacles in carrying out mediation. The research method used is sociological juridical, with descriptive research specifications. Source of data used primary and secondary data. The data obtained is presented systematically with tabulations and descriptive text, and the analysis is carried out using qualitative analysis. Based on the results of the study it can be concluded that the implementation of mediation in the Banyumas Class II District Court is in accordance with the Perma No. procedure. 1 of 2016 with the results of the lawsuit case index from 2020 to 2022 has not been effective because there are several obstacles that affect the implementation of mediation. The factors that influence the implementation of mediation are derived from community factors and cultural factors.

Keywords: Alternative Dispute Resolution, Mediation, Court